

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tingkat kesiapan keuangan yang berbeda pada setiap daerah. Kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang menguntungkan daerah-daerah yang mempunyai sumber daya potensial menganggap kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang tidak menguntungkan (Norregaard, 2013).

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, mengakibatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban, terutama dalam bidang keuangan. Peningkatan kinerja dari pemerintah daerah dapat terwujud, apabila pengelolaan dalam keuangan daerah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Triska dan Sapari, 2020:2).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana APBD tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. (R. Agoes Kamaroella, 2017:126).

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 29), Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi, manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut”. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membuat peraturan dalam pembangunan daerah sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah wajib untuk diberikan setiap tahunnya (Dihan Lucky, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam rangka APBD. Untuk menunjukkan tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang pemerintah daerah melalui kinerja pemerintah yaitu meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode tertentu. Selama periode tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya (Ni Kadek dan Ni Putu, 2019:2836).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

APBD adalah suatu anggaran daerah. Suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur sebagai berikut (Halim dan Kusufi, 2012: 22):

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Dalam membiayai kegiatan operasionalnya, kemampuan setiap daerah berbeda-beda. Sehingga agar dapat mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan berupa Dana Perimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana perimbangan sendiri

terbagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Riko dan Rafiudin, 2015:2).

Adapun salah satu kriteria yang menunjukkan bahwa suatu daerah otonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Maka, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya keuangannya sendiri, sehingga pemerintah daerah harus mampu meminimalkan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila tingkat pemerintah dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing (Wan Vidi Rukmana, 2013:2).

Kinerja keuangan daerah sendiri merupakan bagaimana pencapaian pelaksanaan hasil dari kerja dibidang keuangan daerah ditetapkan melalui suatu kebijakan tertentu, contoh dari kinerja keuangan yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah serta belanja daerah. Kebijakannya dalam mempertimbangkan kepengurusan keuangan ataupun penekanan terhadap tujuan utamanya, adalah: (a) sumber pendanaan yang diberikan daerah otonominya dalam pelaksanaannya yang diberikan untuk menjadikan tanggungjawab, (b) pengurangan kesenjangan fiskal yang terjadi antar pemerintahan pusat dan daerah maupun daerah dengan daerah, (c) peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta (d) peningkatan efektifitas, efisiensinya, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya daerah yang terkhusus dalam bidang keuangan (Arum, 2017:4).

Untuk melihat besar anggaran baik pendapatan maupun belanja dapat tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melalui data Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, hampir setiap tahunnya pendapatan daerah di Kota Tasikmalaya didominasi oleh Dana Perimbangan. Proporsi nilai Dana Perimbangan dari Pendapatan Daerah tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Persentase Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah
Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2021

| Tahun | Dana Perimbangan | Pendapatan Daerah | Persentase (%) |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2020 | 1.168.782.148.000 | 1.671.546.639.997 | 69,92 |
| 2021 | 1.260.722.823.000 | 1.639.586.890.970 | 76,89 |

Sumber: djpk.kemenkeu.co.id, data diolah penulis.

Dari tabel 1.1, menunjukkan bahwa Dana Perimbangan mendominasi Pendapatan Daerah karena persentase di tahun 2020 dan 2021 karena melebihi angka 50%. Dan persentase Dana Perimbangan menunjukkan kenaikan sebesar 6,92% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sehingga dapat dilihat bahwa Dana Perimbangan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Daerah di Kota Tasikmalaya.

Tabel 1.2
Persentase Anggaran Dana Bagi Hasil (Pendapatan Transfer Antar Daerah)
terhadap Pendapatan Daerah
Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2021

| Tahun | Pendapatan Transfer Antar Daerah | Pendapatan Daerah | Persentase (%) |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|
| 2020 | 63.761.500.000 | 1.671.546.639.997 | 3,81 |
| 2021 | 129.040.088.000 | 1.639.586.890.970 | 7,87 |

Sumber: djpk.kemenkeu.co.id, data diolah penulis.

Dari tabel 1.2, persentase Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 4,06% dari 3,81% menjadi 7,87%. Hal tersebut sudah tentu sejalan dengan meningkatnya persentase Dana Perimbangan terhadap

Pendapatan Daerah, walaupun persentase Pendapatan Transfer Antar Daerah terhadap Pendapatan Daerah tidak sebesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 1.3
Persentase Anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat) terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2021

| Tahun | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Pendapatan Daerah | Persentase (%) |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|
| 2020 | 1.105.020.648.000 | 1.671.546.639.997 | 66,11 |
| 2021 | 1.131.682.735.000 | 1.639.586.890.970 | 69,02 |

Sumber: djpk.kemenkeu.co.id, data diolah penulis.

Dari tabel 1.3, persentase Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat) terhadap Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar 2,91% dari 66,11% menjadi 69,92%. Sehingga dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu penyumbang yang cukup besar terhadap Pendapatan Daerah khususnya Dana Perimbangan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi mengenai Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian.

1. Abdullah, Dri Asmawanti dan Febriansyah (2015). Melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan". Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Ihsan Arief (2015). Melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh”. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
3. Fauzan Jauhar (2016). Melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat”. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Lalu, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
4. Mulia Andirfa, Hasan Basri dan M. Shabri A. Majid (2016). Melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh”. Penelitian ini dilakukan pada 18 Kabupaten dan 5 Kota di

Provinsi Aceh. Diperoleh hasil bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Lalu, Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Zainal Putra (2016). Melakukan penelitian mengenai “*The Influence of Locally Generated Revenue, Public Allocation Funds and Specific to Financial Performance of the Region in The City/Regency Government in Aceh Province*”. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018). Melakukan penelitian mengenai “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo”. Diperoleh hasil dengan pengujian secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dan untuk pengujian secara simutan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

7. Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018). Melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
8. Yuliasti Leki, Amran T. Naukoko dan Jacline I. Sammual (2018). Melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat”. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
9. Ade Pipit Fatmawati dan Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi (2019). Melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi”. Diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik secara parsial maupun simultan.
10. Eve Ida Malau, Erlina dan Sirojuzilam (2019). Melakukan penelitian mengenai “*The Effect of Local Government Revenue (LGR), Balance Fund, Capital*

Expenditure and Fiscal Stress on The Financial Perfomance of Regonal Government in The District/City of Sumatera Utara Province". Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Tekanan Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

11. Firmansyah Thalib dan Diah Ekaningtias (2019). Melakukan penelitian mengenai "*The effect of orginal LG revenue, balancing fund, and capital expenditure on LG financial performance in regencies in East Java Province*". Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
12. Komang Aryagus Wiguna dan I Ketut Jati (2019). Melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah". Diperoleh hasil bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
13. Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto dan Dessy Noor Farida (2019). Melakukan penelitian mengenai "*The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance*". Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

14. Refi Susanti dan Asri Eka Ratih (2019). Melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Diprovinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2016*”. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Lalu adapun pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
15. Farid Madjodjo, Charis Muhammad Saleh dan Fadli Dahlan (2020). Melakukan penelitian mengenai “*The Influence of Intergovernmental Revenue Budgets and Clarity of Budget Targets on The Financial Performance of Regional Governments: The Case of The Regional Apparatus Organization of The City of Tidore Island*”. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Antar Pemerintahan berperan penting untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan faktor signifikan untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
16. I Gusti Putu Putra Sambara dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2020). Melakukan penelitian mengenai “*The Influence Of Regional Revenue, Balancing Funds,*

And Capital Expenditure On Regional Financial Performance”. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

17. Muhammad Yasin (2020). Melakukan penelitian mengenai “*Analysis of Regional Original Revenues and Routine Expenditure on Regional Financial Performance in East Java Regencies and Cities*”. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, Belanja rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.
18. Rahmat Yuliansyah, Eva Indah Susanti dan Asri Yanti (2020). Melakukan penelitian mengenai “*The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governmets in West Java Province in 2013-2017*”. Dengan melakukan pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Lalu untuk pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

19. Triska Omega Fatmawati dan Sapari (2020). Melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
20. Clara Neltje Meini Rotinsulu, Mahfud Nurnajamuddin, Masdar Mas’ud dan Sudirman (2021). Melakukan penelitian mengenai “*The Effect Of Budget Participation, Transparency and Internal Control on Accountability and Regional Financial Performance Banggai District*”. Diperoleh hasil bahwa Partisipasi Anggaran, Pengendalian Internal dan Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan untuk variabel Transparansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 1.4
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

| No | Peneliti, Tahun dan Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber |
|----|---|--|---|--|--|
| 1 | Abdullah, Dri Asmawanti dan Febriansyah (2015), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah | Secara parsial: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan | Jurnal Akuntansi Volume 3, Nomor 1, Oktober 2015 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| | Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan” | Variabel Independen : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus | | Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | ISSN: 2303-0356 |
| 2 | Ihsan Arief (2015), “Pengaruh Pendapatan Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah Variabel Dependen: Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Otonomi Khusus | PAK dan Dana Otsus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol.8 No. 2, Juli 2015, PP 109-118 ISSN: 1693-3397 |
| 3 | Fauzan Jauhar (2016), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal | Secara Parsial: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan | Jurnal Akuntansi Vol 4, No. 1 (2016) |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat” | Variabel Independen : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus | | terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. | |
| 4 | Mulia Andirfa, Hasan Basri dan M. Shabri A. Majid (2016), “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh”. | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel Independen: Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah | Pengujian Parsial: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian Simultan: | Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 5 No. 3 ISSN: 2302-0164 pp. 30-38 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | | | | Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | |
| 5 | Zainal Putra (2016), “ <i>The Influence of Locally Generated Revenue, Public Allocation Funds and Spesific To Financial Performance if The Region in The City/Regency Government in Aceh Province</i> ” | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | <i>Efebi Economic And Finance Review</i> Vol. 1, No. 1 (2016) Print ISSN: 2548-5261 e-ISSN: 2548-527X |
| 6 | Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018), “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Dana Alokasi Umum dan Dana Akokasi Khusus | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah | Pengujian Parsial: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus | <i>Journal of Accounting Science</i> Vol. 2 No. 1 e-ISSN: 2548-3501 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kabupaten Gorontalo” | | | memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian Simultan: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bersama-sama signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | |
| 7 | Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panja Sedana (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan pemerintah Daerah | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. | E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.7, No. 2, 2018: 1080-1110 ISSN: 2302-8912 |
| 8 | Yulianti Leki, Amran T. Naukoko dan Jacline I. Sumual | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan | Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| | (2018), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat” | Pemerintah Daerah | dan Belanja Modal | terhadap kinerja keuangan. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah | No. 5 Tahun 2018 |
| 9 | Ade Pipit Fatmawati dan Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi (2019), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. | Variabel Dependen: Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan | Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik secara parsial maupun simultan. | Jurnal Akuntansi Tahun XII No. 02 Bandung Okt 2019 ISSN: 1979- 8334 |
| 10 | Eve Ida Malau Erlina dan Sirojuzilam (2019), “ <i>The Effect of Local Government Revenue (LGR), Balance Fund, Capital Expenditure and Fiscal Stress in The</i> | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan , Belanja Modal, dan Tekanan Fiskal | Pengujian Parsial: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Tekanan Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan | <i>Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance</i> Vol.2 No.2 (2019) |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| | <i>Financial Performance of Regional Government in The District/City of Sumatera Utara Province</i> | | | Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | |
| 11 | Firmansyah Thalib dan Diah Ekaningtias (2019), “ <i>The effect of original LG revenue, balancing fund, and capital expenditure on LG financial performance in regencies in East Java Province</i> ” | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal | Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan. | <i>The Indonesian Accounting Review Vol. 9 No. 1, January – June 2019, pages 39-49</i> |
| 12 | Komang Aryagus Wiguna dan I Ketut Jati (2019), “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah” | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak signifikan berpengaruh terhadap | E-Jurnal Akuntansi Vol.28.1.Juli (2019): 85-108 ISSN: 2302-8556 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | | Kinerja Keuangan Daerah. | |
| 13 | Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto dan Dessy Noor Farida (2019), “ <i>The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance</i> ” | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | <i>Journal of Islamic Accounting and Finance Research</i> Vol.1 No.1 (2019), 25-46 ISSN (Print): 2715-0429 ISSN (Online): 2714-8122 |
| 14 | Refi Susanti dan Asri Eka Ratih (2019), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2016”. | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal | Pengujian Parsial: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | Jurnal Revi. Tanjungpinang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Martitim Raji Ali Haji (UMRAH) |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | | Pengujian Simultan: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | |
| 15 | Farid Madjodjo, Charis Muhammad Saleh dan Fadli Dahlan (2020), “ <i>The Influence if Intergovernmental Revenue Budgets and Clarity of Budget Targets on The Financial Performance of Regional Government: The Case of The Regional Apparatus Organization of The City of Tidore Island</i> ” | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel Independen: Pendapatan Antar-Pemerintahan dan Kejelasan Sasaran Anggaran | Pendapatan Antar-Pemerintahan berperan penting untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan faktor signifikan untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | <i>Journal Accountabilty Volume 9, Number 2, 2020, 60-71</i> |
| 16 | I Gusti Putu Putra Suambara dan Ni Putu Ayu | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan | <i>American Journal of Humanities and Social Science</i> |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|
| | Darmayanti (2020), <i>“The Influence Of Regional Revenue, Balancing Funds, And Capital Expenditure On Regional Financial Performance”</i> | Pemerintah Daerah | Perimbangan dan Belanja Modal | terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. | <i>Research (AJHSSR) Volume-4, Issue-6, pp 220-225</i> e-ISSN: 2378-703X |
| 17 | Muhammad Yasin (2020), <i>“Analysis of Regional Original Revenue and Routine Expenditure on Regional Financial Performance in East Java Regencies and Cities”</i> | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Rutin | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | Jurnal Mantik Volume 3 Number 4, February 2020, pp 64-69 E-ISSN: 2685-4236 |
| 18 | Triska Omega | Variabel Dependen: | Variabel Independen: | Pendapatan Asli Daerah | Jurnal Ilmu dan Riset |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| | Fatmawati dan Sapari (2020), “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” | Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Independen : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus | Pendapatan Asli Daerah | (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah. | Akuntansi Vol. 9 No.4 e-ISSN: 2460-0585 |
| 19 | Rahmat Yuliansyah, Eva Ida Malau Erlina dan Sirojuzilam (2020), “ <i>The Effect of Local Government Revenue (LGR), Balance Fund, Capital Expenditure and Fiscal Stress in The Financial Performance of Regional Government in The District/City of Sumatera Utara Province</i> ” | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tekanan Fiskal | Pengujian Parsial: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Tekanan Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | <i>Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance</i> Vol. 2 No. 2 (2019) |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 20 | Clara Neltje Meini Rotinsulu, Mahfud Nunnajamuddin, Masdar Mas'ud, dan Sudirman (2021), " <i>The Effect Of Budget Participation, Transparency and Internal Control on Accountability and Regional Financial Performance</i> " | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Variabel Dependen: Akuntabilitas Variabel Independen: Partisipasi Anggaran, Transparansi dan Pengendalian Internal | Partisipasi Anggaran, Pengendalian Internal dan Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Lalu, transparansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | <i>American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) Volume-5, Issue-1, pp-296-304</i> e-ISSN:2378-703X |
| Ratu Wafa Salsabila (2021) 173403015 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Kota Tasikmalaya tahun 2010-2019) | | | | | |

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk melancarkan keberhasilan otonomi daerah maka hal tersebut dapat tercermin dari kinerja keuangan pemerintah daerah atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah mampu mengelola kekayaan daerahnya dengan baik dimana nilai pajak daerah lebih besar dari pendapatan daerah lainnya baik dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun hampir disetiap tahunnya dana perimbangan mendominasi pendapatan daerah di Kota Tasikmalaya yang seharusnya pendapatan asli daerah yang mendominasi pendapatan daerah agar Kota Tasikmalaya bisa

dikatakan memiliki kinerja keuangan daerah yang baik. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”** untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari kemampuannya dalam mengelola keuangan pemerintah daerah yang tercermin melalui data realisasi APBD dan juga masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu antara pengaruh variabel dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Tasikmalaya tahun 2007-2019?
2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2007-2019 secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2007-2019 secara bersama-sama (simultan)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Tasikmalaya tahun 2007-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2007-2019 secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2007-2019 secara bersama-sama (simultan).

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis pada bidang Akuntansi Sektor Publik mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan mengenai bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian pada bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain untuk peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum yang tertarik pada bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dengan mengambil dan menganalisis data yang diterbitkan pada *website* resmi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.kemenkeu.co.id dari tahun 2007-2019.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Agustus 2021.